PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

*(The Role of International and Regional Organizations in Resolving Human Rights
Violations of Human Trafficking in Indonesia)*

Iskandar, Nursiti
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
Iskandar200398@gmail.com

ABSTRACT

Human Trafficking is a transnational crime. In 2019, KPPA recorded 213 cases and increased to 400 in 2020. This condition requires the state to take firm action to protect citizens, especially women and children, from being trapped in human trafficking. The purpose of this article is to analyze the role of international and regional organizations in helping to solve the problem of trafficking in person, the government and law enforcement officers in resolving the criminal act of trafficking in persons in Indonesia, and efforts to protect victims of trafficking in person. This study uses a normative juridical research method with a literature review. The primary legal material used is law number 21 of 2007 concerning the crime of trafficking in persons (TPPO). The study shows that IOM and ASEAN have made various efforts to resolve this through facilitation of regulation-making, diplomacy between transit and destination countries, coordination between ministries and the police for fast and appropriate action. The TPPO law does not generate a deterrent effect since it provides low sanctions. The government must improve the prevention system and victims protection and change the law so that its punishment can deter perpetrators.

Keywords: *victim protection, organizational role, trafficking.*

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional. Tahun 2019, KPPA mencatat 213 kasus dan meningkat menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Kondisi ini mewajibkan negara mengambil tindakan tegas untuk melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak agar tidak terjebak dalam perdagangan orang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran organisasi internasional dan regional dalam mengatasi persoalan perdagangan orang, peran pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta upaya perlindungan kepada korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM dan ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan perdagangan orang melalui fasilitasi pembuatan regulasi, diplomasi antar negara transit dan negara tujuan, koordinasi antar kementerian dan kepolisian untuk penindakan secara cepat dan tepat. UU TPPO tidak menimbulkan efek jera karena memberikan sanksi rendah. Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban, serta menetapkan hukuman yang dapat menjerakan pelaku.

Kata Kunci: *perlindungan korban; peran organisasi; trafficking.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia punya hak asasi yang sama, yang melekat sejak manusia tersebut dilahirkan. Hak dasar tersebut adalah hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk terbebas dari segala bentuk penindasan. Hak-hak ini berlaku secara universal dan harus dihormati oleh semua orang.¹ Perjuangan penegakan hak asasi manusia sudah berlangsung sejak manusia diciptakan di bumi. Mulai dari Nabi Adam hingga saat ini. Setiap manusia dituntut untuk saling menghormati dan menyayangi.² Dalam catatan sejarah, upaya penegakan hak asasi manusia sudah dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan kuno. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan seperti Kode Hammurabi di Babylonia 2100 tahun SM. dalam perintah Raja Thutmose di Mesir, dan perintah Raja Ashoka di India pada abad ke 3. Selain dalam perintah raja-raja, penegakan hak asasi manusia juga ditegaskan dalam berbagai kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an.³ Tapi faktanya, pelanggaran HAM masih terus terjadi di kehidupan manusia, seperti tindakan perdagangan orang.

Perdagangan orang atau *human trafficking* adalah kejahatan transnasional. Kejahatan ini tidak mudah untuk dideteksi karena dilaksanakan secara terorganisir dan profesional. Kejahatan ini sering terjadi di negara berkembang yang berpopulasi besar, dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, seperti negara Indonesia. Alasan tingginya angka kejahatan ini di negara berkembang karena dipicu oleh faktor ekonomi. Besarnya jumlah penduduk menyebabkan banyaknya jumlah pekerja dengan gaji yang relatif rendah. Karena itu tawaran kerja dari luar negeri dengan upah yang tinggi menjadi

daya tarik yang kuat untuk menerima pekerjaan tersebut. Pada tindak pidana perdagangan orang, ada beberapa tahapan yang dilakukan. dimulai dengan perekrutan korban. Adakalanya pelaku menjanjikan kemudahan dan keuntungan yang bisa didapatkan oleh korban atau keluarga korban. Pelaku bahkan dapat memberikan pinjaman uang yang akhirnya akan menjerat korban untuk mengikuti kehendak pelaku untuk direkrut sebagai tenaga kerja. Karena itu pelaku akan merekrut seseorang dengan perekonomian yang rendah, fisik yang sehat namun mental yang lemah serta kurang berpendidikan. Dengan kriteria tersebut pelaku akan mudah membujuk-rayu dengan iming-iming atau mengancam korbannya. Tahap berikutnya adalah pengiriman korban ke tempat penampungan, di mana para korban akan dikumpulkan dengan alasan akan mendapatkan pembekalan. Tahapan penempatan di penampungan ini sesungguhnya untuk pengkondisian ke mana dan dengan cara apa korban akan dipindah tempatkan ke daerah tujuan. Dalam tahapan ini akan bekerja satu atau beberapa orang agen.⁴

Dalam siaran KPPA Nomor: B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021 menyatakan bahwa angka perdagangan orang di Indonesia meningkat di masa pandemik. Menurut Deputy Bidang Perlindungan Anak, perdagangan orang sejak tahun 2020 meningkat 62,5% baik dalam negeri maupun luar negeri. Para korban perdagangan orang di eksploitasi ke luar negeri.⁵ Data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Perdagangan Orang sejak tahun 2015 hingga 2019, jumlah perdagangan orang di Indonesia mencapai 2.648 jiwa, 2.319 adalah korban perempuan dan 329 adalah korban laki-laki. Dari data tersebut jelas dapat dilihat bahwa mayoritas korban kejahatan ini adalah perempuan. Laporan KPAI tentang perdagangan anak, sejak

1 Ni Putu Rai Yuliarti; Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Trafficking Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi* Volume 9 (2020): 1397.
2 Akmal, *Hak Asasi Manusia Teori Dan Praktek* (Padang: UNP Press Padang, 2015): 1.
3 Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019): 22.

4 Yohanes Suhardin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 20, no. Nomor 3 (2008): 474.
5 Wincent Anggada, "Peran Komisi Antar Pemerintah ASEAN Tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) Tentang Perdagangan Manusia Di Indonesia," *Jurnal Internasional Ilmu Sosial, Ekonomi dan Seni* Volume 10, no. Nomor 1 (2020): hlm. 3-4.

Januari hingga April 2021, KPAI telah menangani 35 laporan kasus TPPO dengan jumlah korban 234 orang anak. Delapan puluh tiga persen diantaranya merupakan kasus prostitusi anak.⁶ Dari data laporan UNICEF, jumlah anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan orang di Indonesia mencapai 100.000 jiwa, 30% yang dijadikan pekerja prostitusi adalah anak-anak yang masih berusia di bawah delapan belas tahun.⁷ Data IOM di Indonesia menyatakan bahwa korban perdagangan orang di Indonesia meningkat di tahun 2020. Angka korban perdagangan tidak hanya meningkat dalam lintas negara, namun juga meningkat dalam wilayah negara Indonesia. Mayoritas data korban yang diterima oleh IOM adalah perempuan yang dieksploitasi sebagai budak seksual. KPPA juga mencatat bahwa angka korban perdagangan orang meningkat sejak masa pandemi Covid-19. Dalam catatan KPPA pada tahun 2019 terdapat 213 kasus dan tahun 2020 kasus perdagangan orang meningkat menjadi 400 kasus.

Laporan tahunan perdagangan orang di Indonesia tahun 2020, yang dipublikasikan pada website resmi Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mencapai standar minimum dalam melakukan pemberantasan perdagangan orang. Pemerintahan Indonesia saat ini baru melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban melalui Kementerian Sosial. Sementara penegakan hukum terhadap pelaku masih sangat minim. Data laporan Mahkamah Agung menunjukkan penurunan kasus yang ditangani secara hukum sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Data Penyelesaian Perkara TPPO

Tahun	Penuntutan	Putusan
2017	407	331
2018	316	279
2019	226	204

Sumber: Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia

6 "Menutup Celah Perdagangan Anak," <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/>.

7 Mohammad Fadil, "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Volume 1, no. Edisi 5 (2013): hlm. 2.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah perkara tindak pidana perdagangan orang yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dari tahun ke tahun terus menurun, sementara data kasus terus meningkat. Di tahun 2017, terdapat 407 perkara yang dituntut dan hanya 81,3% yang diputuskan. Pada tahun 2018, perkara yang dituntut turun 22% menjadi 316 perkara, dan semakin menurun 19% di tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia belum dilakukan dengan intensif.

Beberapa organisasi kemasyarakatan menduga bahwa pelaku perdagangan orang mempunyai hubungan dengan oknum kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Pelaku perdagangan orang bukan saja dari kalangan masyarakat biasa namun juga ada dari beberapa pejabat negara, karena itu pelaku sangat sulit untuk terdeteksi dan ditangkap. Upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga masih sangat minim yang dilihat dari belum adanya SOP untuk mengidentifikasi korban.⁸

Pada dasarnya perdagangan orang merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi, dimana manusia dieksploitasi dengan melakukan berbagai kekerasan dan ancaman. Perdagangan orang esensinya adalah menghilangkan harkat dan martabat seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus dilindungi dan dihormati.⁹ Meningkatnya tindak pidana perdagangan orang pada setiap tahunnya, menjadikan hal ini perlu segera diselesaikan baik secara nasional maupun internasional. Negara wajib melindungi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan yang

8 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020," *Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia*, last modified 2020, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/> Diakses 30 Desember 2021.

9 Penny Naluria Utama, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Handling Trading of Criminal Acts by The Government of East Nusa Tenggara Province)," *Jurnal HAM* Volume 10, no. Nomor 2 (2019): 200.

dapat merugikan dan mengganggu ketentraman rakyat Indonesia. Hal demikian diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Ada 40 hak yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Salah satunya adalah terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan hak atas kebebasan.¹⁰ Di tingkat internasional, PBB dan interpol mengambil tindakan terhadap perdagangan orang di Asia dengan memperkenalkan protokol Palermo yang dilaksanakan pada tahun 2000 dan memiliki 117 penandatanganan.¹¹

Dari uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam artikel ini adalah a) bagaimana peran organisasi internasional dan regional dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia? b) bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? c) bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang di Indonesia?

Artikel ini bukan merupakan penelitian pertama yang mengangkat tema tentang perdagangan orang (*human trafficking*). Dari hasil penelusuran ditemukan beberapa karya tulis yang juga mengangkat tema tentang perdagangan orang. Namun setelah dilakukan penelaahan terhadap penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang ditemukan sebelumnya yaitu:

Cahya Wulandari, dkk., “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya Di Kota Semarang.” Dalam artikel ini ditemukan pokok bahasan tentang faktor-faktor penyebab *human trafficking* terhadap perempuan dan anak serta

kendala dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus perdagangan orang. Penelitian ini fokus terhadap kasus-kasus di wilayah di Kota Semarang.¹²

Okky Cahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*).” Pokok bahasan dalam penelitian ini tentang pertanggung jawaban dari negara dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan hambatan dalam melakukan penanganan terhadap kasus perdagangan orang. Penelitian membahas kasus para tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai korban TPPO. Penelitian ini tidak fokus pada perempuan dan anak, sebagai korban TPPO.¹³

Darwinsyah Minin, “Strategi Penanganan Trafficking di Indonesia (*The Strategy in Dealing with Trafficking in Indonesia*).” Artikel ini fokus mengkaji strategi yang digunakan dalam menangani perdagangan orang di Indonesia, karena kondisi banyaknya korban perdagangan baik dalam negeri maupun transnasional. Strategi yang dilakukan dalam melakukan penanganan perdagangan orang semua atas dasar kebijakan pemerintahan Indonesia tanpa melibatkan organisasi internasional dan regional. Penelitian ini mengharapkan agar tenaga imigrasi dan aparat penegak hukum dapat lebih maksimal dalam menangani kasus perdagangan orang di Indonesia.¹⁴

Maslihati Nur Hidayati, “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan

10 Iskandar;dkk, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Asy-Syariah* Volume 23, no. Nomor 1 (2021): 165.

11 Lisa Curtis; Olivia Enos, “Combating Human Trafficking in ASIA Requires U.S Leadership,” *The Heritage Foundation* (Washington, February 2015): 2.

12 Cahya Wulandari; Sonny Saptioajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” *Jurnal Yustisia*, no. Edisi 90 (2014): 16.

13 Okky Cahyono Nugroho, “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 18, no. Nomor 4 (2018): 556.

14 Darwinsyah Minin, “Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia (*The Strategy in Dealing with Trafficking in Indonesia*),” *Kanun Jurnal Ilmiah Hukum*, no. Nomor 54 (2011): 26.

Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia.” Penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dari sudut hukum internasional dan hukum positif Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini lebih bersifat normatif tanpa mengkaji implementasi dari peraturan tersebut. Disamping itu obyek kasus dalam penelitian lebih mengkaji secara global tidak hanya kasus yang ada di Indonesia namun kasus perdagangan orang di setiap negara di dunia. Sehingga hal ini menjadi perbedaan dengan penelitian yang diteliti saat ini.¹⁵

Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional.” Artikel ini ingin melihat *input* dan *output* dari implementasi kebijakan nasional dalam menangani perdagangan orang khususnya kepada perempuan serta melihat hambatan yang dialami oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah kejahatan pelanggaran HAM perdagangan orang di Indonesia.¹⁶

Dari penelusuran kelima artikel di atas, terdapat perbedaan dengan artikel ini, baik dari segi objek penelitian maupun dari segi tujuan yang dicapai dari tulisan ini. Artikel ini, mengkaji peran dari organisasi internasional dan regional dalam menyelesaikan permasalahan kasus perdagangan orang di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan penegak hukum dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia, serta perlindungan yang diberikan kepada korban perdagangan orang khususnya kepada korban anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, karena mengingat anak adalah aset dari masa depan suatu negara sehingga anak harus dilindungi.

Penelitian ini menganalisis bagaimana peran serta organisasi internasional, khususnya yang bergerak di bidang kemanusiaan seperti IOM dan organisasi regional ASEAN dalam menyikapi permasalahan kemanusiaan perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas dan menyelesaikan kasus perdagangan orang di Indonesia, karena berdasarkan data yang telah diuraikan di atas bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang di Indonesia hingga saat ini masih belum optimal. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan kepada korban perdagangan orang baik yang berada di luar negeri maupun dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian normatif empiris. Sumber data didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan pengkajian mendalam terhadap studi dokumen dengan membaca, memahami dari berbagai literasi dan juga melakukan penelusuran di internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan responden dan informan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan penelitian normatif empiris yang sempurna, terhadap hasil telaah dalam teori-teori, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara dari responden dan informan.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Menyelesaikan Permasalahan Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan orang sering kali berwujud sebagai perdagangan seks, di mana tindakan

15 Muslihati Nur Hidayati, “Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia.,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Volume 1, no. Nomor 3 (2012): 163.

16 Rahmah Daniah;Fajar Apriani, “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional,” *Jurnal Politica* Volume 8, no. Nomor 2 (2017): 137.

17 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Press, 2020): 115.

seks dilakukan secara komersial melalui paksaan dan penipuan. Perdagangan orang merupakan masalah global yang sangat terkenal karena kejahatan ini melibatkan orang-orang di seluruh dunia.¹⁸ Tidak sedikit korban perdagangan orang masih berusia di bawah 18 tahun yang dipaksa, ditipu, dan diancam untuk direkrut dan diangkut sebagai tenaga kerja atau pemberi jasa seks atau sebagai pekerja rumah tangga dengan melakukan kekerasan dan penindasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mencatat 234 anak yang menjadi korban dari 35 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi pada Januari-April 2021. Sebanyak 217 anak atau 93% diantaranya merupakan korban prostitusi.¹⁹ Sejak tahun 2019 terdapat 244 kasus perdagangan anak dengan berbagai macam bentuk seperti prostitusi, pekerja anak, adopsi ilegal, sampai anak menjadi perantara dengan mucikari. Dari data Kedubes Amerika Tahun 2020 bahwa di Indonesia diperkirakan 70.000-80.000 pekerja seks anak dan dewasa yang paling banyak terdapat di Industri pertambangan di Maluku, Jambi dan Papua. Pada tanggal 29 Januari 2020, Polisi telah menahan dua tersangka perdagangan orang, dengan tiga korban masih anak di bawah umur. Tersangka dibawa ke Markas Polres Metro Jakarta Selatan. Kejahatan tersebut terjadi di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan. Para korban ditawarkan menjadi pelayan transaksi seksual di aplikasi Michat. Dalam catatan KPAI jumlah kasus perdagangan anak di antaranya: Di Mojokerto, anak-anak di bawah umur dijual melalui modus membuka sewa rumah kos harian, yang dibantu oleh *resseler* di bawah umur, empat puluh satu orang anak dipekerjakan menjadi prostitusi di salah satu hotel Pontianak. Kasus di Tebet Jakarta Selatan,

pelaku menawarkan layanan *booking out* (BO) menggunakan aplikasi media sosial pekerja seks komersial (PSK) melibatkan anak. Di Kabupaten Bogor, Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat menarik 7 anak yang masih berusia 16 hingga 17 tahun yang dipekerjakan di sebuah pabrik rambut palsu.²⁰

Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols*, perdagangan orang mengandung tiga unsur yaitu: unsur pelaksanaan, sarana dan tujuan. Tindakan itu sendiri terdiri dari perekrutan, penyembunyian, pengangkutan, penyediaan atau perolehan orang. Unsur sarana berkaitan dengan bagaimana tindakan tersebut dilakukan, baik menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan. Unsur yang terakhir adalah tujuan. Tujuan menjelaskan mengapa tindakan tersebut dilakukan, termasuk tujuan eksploitasi.²¹

Kejahatan kemanusiaan terhadap perdagangan orang bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi masalah internasional. Dalam Resolusi PBB Nomor 55/25 Tahun 2000 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang baik di bawah ancaman atau secara paksa dengan menggunakan kekerasan, penganiayaan, tipu muslihat, dan penggunaan kewenangan dalam situasi yang rentan melalui transaksi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang sudah dibahas sebagai isu keamanan internasional. Menurut McFarlane dan McLellan, kejahatan transnasional saat ini muncul sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas nasional dan internasional, sehingga hal ini penting untuk disoroti karena menimbulkan

18 Jaturong Boonyarattanasoontom, "Prevention and Solution in Problem of Human Trafficking in Thailand and Cooperation with Neighboring Countries in ASEAN," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* Volume 12, no. Nomor 1 (2018): 237.

19 Dwi Hadya Jayani, "KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi Hingga April 2021, Jumlah Kasus Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Eksploitasi Pada Anak (Januari-April 2021)," *Databoks*.

20 Kendar Umi Kulsum, "Menutup Celah Perdagangan Anak," *Kompas Pedia*, last modified 2021, accessed October 26 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/menutup-celah-perdagangan-anak>.

21 Samantha Stout, "Human Trafficking in the Wake of Natural Disasters: Is the United States Any Different Than Third World Countries?" (Universitas of Arkansas, 2018): 15 .

dampak yang sangat besar terhadap kestabilan negara, ekonomi nasional dan masyarakat sipil.²²

Perang melawan kejahatan perdagangan orang telah melahirkan beberapa kerja sama internasional dan regional, seperti bentuk kerja sama pemerintahan Indonesia dengan organisasi internasional dan ASEAN dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Salah satu hasil dari bentuk kerjasama dengan ASEAN yaitu merumuskan *ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children* sebagai dasar hukum kerja sama di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara ke-9 yang meratifikasi ACTIP, yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengesahan *Asean Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan, dan Anak). Untuk mengimplementasikan ACTIP dan APA, ASEAN kembali menyusun rencana kerja pemberantasan *Trafficking in Person* (TIP), yang dinamai dengan Bohol TIP Work Plan 2017-2020, yang pada intinya memuat empat point penting yaitu: pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama eksternal. Dalam kerangka *ASEAN Regional Forum* (ARF) terus berupaya memajukan pembahasan dan kerja sama di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. ARF memiliki nilai strategis karena forum ARF memiliki 27 peserta dengan cakupan wilayah paling luas yang dimulai dari Timur Laut Pasifik (Kanada) sampai Samudera Hindia (Pakistan) dan Timur Laut Asia (Jepang). Dalam hal ini Indonesia dapat memanfaatkan forum tersebut untuk meningkatkan kesadaran 27 peserta ARF mengenai pentingnya upaya bersama dalam menanggulangi kasus perdagangan orang. Indonesia melalui wakil Indonesia untuk Komisi HAM antar Pemerintah ASEAN, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), aktif mendorong direalisasikan

pendekatan berbasis HAM dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, yang pada praktiknya mencakup pemberian bantuan bagi korban perdagangan orang yang tidak bergantung pada proses pengadilan dan persyaratan hukum migrasi di negara yang bersangkutan, berfokus kepada korban tanpa adanya diskriminasi, dan segala aspek dalam respon terhadap korban di tingkat nasional, regional dan internasional yang harus memperhatikan hak korban dan kewajiban negara sesuai dengan instrumen HAM regional dan internasional.²³

Organisasi internasional yang turut serta mengupayakan penyelesaian kejahatan ini adalah sebagai berikut:

a. *International Organization for Migration* (IOM)

IOM adalah organisasi kemanusiaan yang fokus bergerak dibidang kemanusiaan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan juga menangani tindak pidana perdagangan orang, yang menjadi isu dan permasalahan internasional. Pada tahun 2007, IOM mengadopsi visi baru, terdapat 12 prioritas program untuk pengembangan dan peningkatan peran organisasi tersebut dibidang kemanusiaan. Salah satunya program IOM tentang migrasi paksa. Pada program ini termasuk meningkatkan manajemen migrasi yang manusiawi dan teratur serta menghormati hak-hak asasi manusia para imigran berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Selama ini meningkatnya angka penyeludupan orang, perdagangan orang, disebabkan oleh bentuk-bentuk imigrasi yang tidak teratur.²⁴

Untuk mewujudkan programnya, IOM bekerja sama dengan berbagai negara di dunia dan berkoordinasi dengan pemerintahan di negara tersebut, dalam upaya penyelesaian kasus perdagangan orang.

22 Ralf Emmers, *The Threat Of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking and Sea Piracy* (Madrid, Espana, 2003): 2.

23 Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2018: 80.

24 Megan Bradley, "The International Organization for Migration (IOM): Gaining Power in the Forced Migration Regime," *Journal Canada's on Refugees is Cited* Volume 33, no. Nomor 1 (2017): 99.

Adapun upaya IOM dalam menyelesaikan dan mengantisipasi terjadinya perdagangan orang dengan pemerintah Indonesia adalah mendorong lahirnya instrumen hukum tentang perdagangan orang dan membantu penyelesaian perdagangan orang yang ada di Indonesia. Upaya tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan, perlindungan, penuntutan, kebijakan dan bentuk kerja sama baik secara internasional maupun antar kelembagaan pemerintahan Indonesia. Selain itu IOM dan Pemerintahan Indonesia memberikan bantuan proses hukum kepada korban perdagangan orang di Indonesia. IOM Indonesia memberikan bantuan pemulangan ke negara asal korban, memberikan bantuan pangan, medis, tempat tinggal yang layak bagi korban dan pemenuhan hak upah yang telah ditahan oleh perusahaan tempat dimana korban bekerja. Tidak sedikit korban perdagangan orang yang hak upah dalam bekerja tidak dipenuhi oleh majikan atau perusahaan tempat korban bekerja.

IOM memperkirakan bahwa hampir 50% tenaga kerja Indonesia menjadi korban dari perdagangan orang. IOM juga mengidentifikasi bahwa kurang lebih 3.840 korban perdagangan orang, 90% diantaranya adalah perempuan, dan 55% dilakukan eksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. IOM juga mengeluarkan laporan tentang jumlah perdagangan orang yang ada di Indonesia. Dalam laporan tersebut IOM menyatakan bahwa sebanyak 82% korban perdagangan dikirim ke luar Indonesia, selebihnya diperdagangkan di Indonesia. Dari laporan IOM tersebut diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling banyak melakukan pengiriman manusia untuk diperdagangkan. Indonesia juga menjadi salah satu negara impor perdagangan orang dan menjadi negara transit dalam melaksanakan kejahatan ini. Hal ini didukung oleh data yang dikeluarkan oleh UNICEF yang menyatakan bahwa hampir setiap tahunnya di negara Indonesia terjadi perdagangan orang dengan jumlah korban kurang lebih 100 ribu setiap tahunnya, dan mayoritas yang menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan. Dalam menanggulangi pelanggaran

HAM tersebut organisasi IOM, NGO, badan internasional dan pemerintahan Indonesia telah melakukan upaya berupa pembentukan sebuah program yang dikenal dengan istilah *Empower*. Tujuan dibentuknya program ini untuk mencegah terjadinya perdagangan orang dan mengutamakan kapasitas dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban *human trafficking*. disamping itu IOM juga mengupayakan agar Pemerintah Indonesia untuk melakukan hubungan bilateral dengan negara-negara lain yang dianggap sering menjadi pusat tujuan perdagangan orang. Cara ini pernah ditempuh dan efektif dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Malaysia.²⁵

Dalam mewujudkan program IOM untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, IOM bekerjasama dengan Kepolisian RI dalam menyelesaikan perdagangan orang. Salah satu upaya kerjasama IOM dengan pihak Kepolisian RI adalah dengan menggalang kesatuan antar lembaga yaitu kementerian pemerintahan Indonesia seperti Kementerian Hukum dan HAM, Departemen Sosial, Keimigrasian, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta badan legislatif dan yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia serta memberikan perlindungan terhadap korban. Kasus perdagangan orang tidak bisa terlepas dari aspek sosial, ekonomi, hukum dan politik. Oleh karena itu kesatuan lembaga ini dibentuk untuk mengupayakan penyelesaian segala bentuk permasalahan tentang perdagangan orang. Tentunya aparat kepolisian saja tidak cukup untuk melakukan pemberantasan terhadap pelaku. Sehingga perlunya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga Keimigrasian yang harus memperketat pemeriksaan perbatasan, dan Kementerian ekonomi yang harus selalu siap untuk mensuplai anggaran untuk aparat penegak hukum khususnya kepolisian, dan begitu juga

25 Ghani Wal Arif, "International Organization For Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014," *Jurnal IOM Fisip* Volume 3, no. Nomor 1 (2016): hlm 8-11.

lembaga-lembaga lain yang mempunyai peran dan fungsinya dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia. Berdasarkan keterangan Polri, salah satu penyebab tidak efektifnya penegakan terhadap pelaku perdagangan orang adalah karena kurangnya anggaran. Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang melewati batas negara, sehingga untuk menindak pelaku seperti dalam melakukan penyelidikan, penangkapan dan penyidikan membutuhkan anggaran yang sangat banyak. Penindakan terhadap pelaku kejahatan transnasional berbeda dengan penegakan terhadap kejahatan konvensional dengan biaya yang relatif ringan. Penindakan terhadap kejahatan internasional yang terorganisir membutuhkan anggaran banyak, namun anggaran untuk aparat penegak hukum saat ini khususnya kepolisian masih terhitung minim. Oleh karena itu agar penegakan terhadap pelaku dapat ditegakkan dengan sempurna maka perlu dilakukan kesatuan antar lembaga.²⁶

b. ASEAN

Ketika terjadi suatu permasalahan baik hukum, ekonomi, sosial, dan politik dalam kawasan Asia Tenggara, organisasi ASEAN selalu tampil di depan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Begitu juga dalam permasalahan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, dimana ASEAN berupaya untuk menangani dan menyelesaikan persoalan tersebut. Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa peran utama ASEAN adalah menjalin komunitas global yang dimulai dengan tujuan dan kesatuan bersama para anggota. ASEAN mengambil langkah untuk menjadi peserta yang berperan penting menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian internasional, meskipun peran dalam isu perdagangan orang masih dinilai minim.²⁷

Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak manusiawi sekaligus melecehkan hak-hak asasi manusia. Korban perdagangan orang dipaksa untuk menjadi pekerja

rumah tangga, pelacuran, dan kawin paksa.²⁸ Dalam menyelesaikan permasalahan ini ASEAN sebagai organisasi regional mempunyai peran yang sangat penting untuk menuntaskan kejahatan ini.

Upaya ASEAN dalam menyelesaikan kasus perdagangan orang di Indonesia yaitu dengan melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dan dunia untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan tersebut. ASEAN meminta kepada negara-negara anggota untuk mengusut kejahatan perdagangan orang, mengupayakan segera proses hukum serta mengembalikan korban ke negara asal. Dalam penanganan kejahatan perdagangan orang, ASEAN mengupayakan dengan melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan 3 komunitas ASEAN, yaitu: Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.²⁹

Ketiga komunitas tersebut beranggotakan antara lain: Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Setiap komunitas memiliki tugas dan fungsi masing-masing. *Pertama*, Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN mempunyai peran utama untuk menjaga kawasan Asia agar tetap tercipta kedamaian, stabil dan sejahtera. Tujuan ASEAN bekerjasama dengan komunitas politik dan keamanan ASEAN, untuk melakukan hubungan politik bilateral dan multilateral dalam menanggulangi masalah pelanggaran hak asasi manusia dan tenaga kerja ilegal. Komunitas Politik dan Keamanan berupaya untuk memberantas kasus perdagangan orang di Asia Tenggara untuk memulihkan di mata dunia internasional.³⁰ *Kedua*, Komunitas Ekonomi ASEAN, yang bertujuan untuk mengefektif

26 *Ibid*, *Ibid*.

27 Kavi Chongkittavorn, *Indonesia Expand ASEAN's Role*, 2011.

28 Adinata, "Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues Di Indonesia 2005-2009," *Jurnal Hubungan Internasional* Volume 1, no. Nomor 13 (2012): hlm 46.

29 Wincent, *Op.cit*, hlm. 7

30 Mohadib, "Prospek Dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN," *Jurnal Kajian LEMHANAS RI* Edisi 35 (2018): 39.

dan mengoptimalkan dalam hal permasalahan perdagangan seperti meminimalisir biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Tugas utama komunitas ekonomi ASEAN yaitu mengatasi ekonomi ASEAN di bidang permodalan, barang dan jasa serta tenaga kerja. Tujuan ASEAN melakukan koordinasi dan kerjasama dengan komunitas ekonomi ASEAN karena banyaknya korban perdagangan orang yang dipekerjakan di pabrik dan pekerja rumah tangga tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Tindakan ini sangat menciderai hak asasi manusia seseorang, untuk mengatasi permasalahan tersebut ASEAN melakukan kerjasama dengan anggota-anggota komunitas ekonomi ASEAN untuk mengembalikan hak korban. *Ketiga*, Komunitas Sosial Budaya ASEAN, komunitas yang berfokus kepada penanganan isu masyarakat dalam hal bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ASEAN dengan Komunitas Sosial Budaya ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan dan pemajuan terhadap hak tenaga kerja migran. Salah satu faktor penyebab tingginya perdagangan orang adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan pengetahuan. Oleh karena itu ASEAN berupaya melalui kerjasama dengan Komunitas Sosial Budaya ASEAN untuk memperbaiki akar permasalahan dari isu perdagangan orang di Indonesia.³¹

ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN yang menentang perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Deklarasi tersebut dibentuk untuk memberikan arah dalam melakukan upaya bersama secara efektif dalam mengatasi masalah regional yang muncul, yaitu perdagangan orang. Deklarasi tersebut mendorong kerja sama dan pertukaran informasi, menjaga martabat dan hak asasi korban, serta menindak pelaku dan sindikat yang terlibat dalam kasus perdagangan orang. Selain

itu ASEAN juga membentuk komite ASEAN dan Deklarasi Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian kasus perdagangan orang secara efektif. Deklarasi tentang pekerja migran meminta agar negara-negara anggota berkomitmen untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, bermartabat, dan menguntungkan bagi pekerja migran. Selain itu ASEAN mengambil tindakan nyata untuk mencegah atau mengurangi penyelundupan dan perdagangan orang dengan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta memfasilitasi pertukaran data tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerja migran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebijakan dan program terkait dengan pekerja migran baik di negara pengirim maupun negara penerima. Upaya lain yang dilakukan ASEAN adalah mendorong organisasi internasional, mitra dialog ASEAN dan negara-negara lain untuk menghormati prinsip-prinsip dan memberikan dukungan dan bantuan dalam mengimplementasikan Deklarasi ASEAN untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang di Asia Tenggara khususnya Indonesia sebagai negara dengan angka perdagangan orang tertinggi.³²

B. Upaya Pemerintah dan Penegak Hukum dalam Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Manusia di Indonesia

Era globalisasi merupakan masa yang penuh dengan berbagai ancaman dan tantangan global. Kejahatan perdagangan orang merupakan fenomena global yang terjadi di sebagian besar negara di dunia, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Fenomena ini bukan hanya fenomena sosial biasa tetapi sudah menjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Perdagangan orang selalu menimbulkan akibat yang sangat serius bagi korban dan keluarganya, masyarakat dan negaranya. Kondisi berbagai

31 "Masyarakat Sosial Budaya ASEAN," [https://kemlu.go.id/Masyarakat Sosial Budaya ASEAN](https://kemlu.go.id/Masyarakat%20Sosial%20Budaya%20ASEAN), Diakses 28 Oktober 2021.

32 Vannarith Chheang, *Migrant Workers in a People-Centered ASEAN Community and ASEAN-Japan Cooperation*, 2015: 287.

negara, yaitu negara tujuan perdagangan orang, negara transit atau negara sumber perdagangan orang, seperti yang dialami Indonesia. Hal ini menempatkan korban pada posisi yang berisiko tinggi, misalnya: terkait dengan kesehatan, tekanan kekerasan fisik dan mental, yang akan mengancam kualitas generasi penerus Republik Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat rentan menjadi transit dan pusat korban perdagangan orang, tidak sedikit anak dan perempuan Indonesia yang dieksploitasi untuk menjadi tenaga kerja paksa dan perdagangan seks.³³

Dalam menyelesaikan persoalan tersebut langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah melakukan pencegahan terhadap masyarakat Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi, biasanya korban perdagangan adalah tidak memiliki mata pencaharian sehingga dengan mudah dijanjikan oleh pelaku untuk mendapatkan kerja bagi korban. Untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, pemerintah dapat memberikan skema kredit mikro yaitu pemberian bantuan pinjaman kecil yang diberikan kepada seseorang dianggap rentan menjadi korban, hal ini bertujuan agar seseorang yang tidak memiliki mata pencaharian dapat membuka usaha sehingga upaya ini dimungkinkan dapat meminimalisir perdagangan orang dengan menjanjikan pekerjaan sebagai modus kejahatan. Pemberian skema kredit mikro, harus diimplementasikan dengan benar dengan memberikan pelatihan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat masyarakat serta mengacu pada pasar dan realitas lokal. Upaya ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar tidak mudah terjerumus menjadi korban perdagangan orang.³⁴

Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menggunakan politik luar negerinya sebagai upaya menyelesaikan persoalan perdagangan orang yang dikirim ke luar negeri. Korban perdagangan orang yang berada di luar negeri tidak sedikit yang terjerat dengan berbagai persoalan kemanusiaan seperti dipaksa bekerja sebagai pekerja seks dan tindakan eksploitasi lainnya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan tekanan dari tuannya. Menyikapi hal tersebut, pemerintahan Indonesia melalui kebijakan politik luar negerinya bekerja sama dengan negara domisili korban, agar korban diberikan perlindungan dan diharapkan agar korban dipulangkan ke Indonesia. Politik luar negeri merupakan kewenangan dari Kementerian Luar Negeri RI sebagai institusi pemerintahan Indonesia. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mempunyai posisi strategis, khususnya dalam upaya pemerintahan yang mencegah kejahatan perdagangan orang. Di samping itu Kementerian Luar Negeri juga berwenang untuk melakukan hubungan bilateral dengan negara luar dan melakukan diplomasi. Hal ini memberikan respon positif dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang karena dengan adanya hubungan bilateral, pemerintahan Indonesia dapat melakukan negosiasi dengan negara luar agar korban perdagangan orang yang ada di negara tersebut dapat dipulangkan ke Indonesia.³⁵

Di samping menjalin hubungan bilateral dan diplomasi dengan berbagai negara, pemerintah Indonesia juga melakukan hubungan kerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan IOM mempunyai tujuan untuk membantu korban pulang ke negara asalnya. Negara yang menjadi pusat tujuan perdagangan adalah Australia dan Indonesia. Tidak sedikit para korban dikirimkan ke kedua negara ini. Oleh sebab itu pada tahun 2007 dibuat kerjasama yang dikenal dengan

33 Jevlin Solim, "Akomodasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (ACTIP) Dalam Peraturan Indonesia," *Jurnal Fiat Justitia* Volume 13, no.2 (2019): 169.

34 Phil Research Communication Group Marshall, "Re-Thinking Trafficking Prevention A Guide to Applying Behavior Theory," *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking and Asian Development Bank (UNIAP)*, 2011: 10.

35 Genewati Wuryandari, "Menelaah Politik Luar Negeri Dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia" (n.d.): *Pusat Penelitian Politik*, (2016): 219-220.

istilah *Reinforcing Management of Irregular Migration* (RMIM), sebagai bagian dari program bantuan bagi Korban. IOM Indonesia memberikan pertolongan kepada korban berupa pemulangan ke negara asal, bantuan berupa makanan dan pengobatan, tempat tinggal, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan upah, dan bantuan hukum. Untuk pemulangan ke negara asal, bantuan diberikan melalui koordinasi antara Misi IOM di negara asal, Kedutaan-Kedutaan Besar, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Kedutaan-Kedutaan Besar mengeluarkan Surat Identitas atau Dokumen Perjalanan membantu kantor imigrasi di Indonesia mengeluarkan dokumen resmi untuk meninggalkan Indonesia.³⁶ Untuk memerangi dan menyelesaikan kejahatan perdagangan orang, tidak cukup hanya dengan perluasan kebijakan politik pemerintahan dan legislatif semata, namun juga harus ditempuh upaya melalui pembentukan undang-undang pidana dengan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan perdagangan orang.³⁷ Salah satu penyebab terus meningkatnya tindak pidana perdagangan orang adalah karena hukuman yang relatif ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Untuk memerangi perdagangan orang di Indonesia, pemerintah dan penegak hukum harus mengkaji kembali apakah hukum yang berlaku saat ini sudah efektif dalam meminimalisir perdagangan orang di Indonesia. Hukuman yang diatur seharusnya mampu untuk menekan pelaku kejahatan perdagangan orang, karena apabila hukuman yang diatur masih dianggap relatif ringan dan tidak efektif maka perdagangan orang di Indonesia akan sulit untuk diatasi.³⁸

Akhir tahun 2019, berbagai instansi memberikan nilai yang buruk terhadap kinerja dari institusi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dalam catatan Komnas HAM untuk pemerintah, menegaskan bahwa sepanjang tahun 2019 institusi kepolisian tidak melakukan tindakan progresif yang nyata dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia salah satunya penegakan hukum terhadap perdagangan orang.³⁹ Ada beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya penegakan hukum dilakukan dalam penanganan kasus perdagangan orang di Indonesia antara lain karena kejahatan ini pengelolaannya tidak terlihat namun dapat memberikan dampak buruk terhadap stabilitas suatu negara. Di samping itu kejahatan perdagangan orang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu negara karena kejahatan ini mengancam keselamatan negara. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang terpaksa meninggalkan negaranya tanpa tercatat. Selain itu kejahatan perdagangan orang digerakkan oleh organisasi transnasional sehingga hal ini menjadi ancaman bagi negara.⁴⁰ Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang di Indonesia, penegak hukum bekerjasama dengan bea cukai, imigrasi, jaksa, militer penjaga perbatasan, angkatan laut dan KPP untuk melakukan sistem penegakan hukum terpadu. Hingga saat ini dasar hukum yang digunakan penegak hukum dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tingkatan sanksi bagi pelaku perdagangan orang diatur berdasarkan kerugian yang diterima oleh korban. Hukuman yang paling ringan adalah hukuman penjara 3 tahun. Apabila tindakan tersebut sampai membahayakan jiwa korban

36 Diah Ajeng Ariesta Putri, "Kerja Sama International Organization For Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pustaka Benjina Reseource Tahun 2015," *Jurnal Internasional of Relations* Volume 5, no.1 (2019): 1003.

37 Kristof Van Impe, "People for Sale: The Need for a Multidisciplinary Approach Toward Human Trafficking", *International Migration* Volume 38, issue 3, (2000): 124.

38 Samantha Reed Stout, "Human Trafficking in The Wake of Natural Disasters: Is the United States Any Different Than Third World Countries?" (University Of Arkansas, Fayetteville, 2018): 2.

39 Agus Sobarnapraja, "Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* Jilid 14, no. Nomor 1 (2020): 17.

40 Wandu Abbas, "Keamanan Manusia Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Isu Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur," *International Journal Economic Management and Social Science (IJEMSS)* Volume 1, no. Edisi 2 (2018): 47.

atau terganggunya fungsi reproduksi korban maka hukuman ditambah sepertiga dari hukuman semestinya. Apabila menyebabkan matinya korban maka diancam hukuman antara 5 tahun sampai dengan seumur hidup dan denda antara Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah). Selain itu juga diatur sanksi bagi seseorang yang menggerakkan untuk dilakukannya perdagangan orang.⁴¹

Ancaman hukuman terhadap pelaku perdagangan orang yang diatur dalam undang-undang sebagaimana diuraikan di atas masih relatif ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang lain seperti tindak pidana narkoba dan korupsi. Dalam Undang-Undang, kedua tindak pidana tersebut masih menyelipkan ancaman hukuman mati sebagai hukuman terakhir dan paling berat terhadap pelanggar, namun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang paling berat dalam tindak pidana, meskipun menyebabkan matinya korban dan hukuman yang dianggap paling menakutkan di antara hukuman yang lain. Dapat dibayangkan bahwa hukuman terhadap pelaku belum efektif sehingga perlu dilakukan revisi terhadap UU TPPO tersebut, karena hal ini menyangkut hak asasi manusia yang seharusnya wajib dilindungi dan dihormati.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia

Perlindungan yang diberikan terhadap korban perdagangan orang yaitu: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan reintegrasi. Perlindungan korban pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatasi akibat yang dirasakan oleh korban sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan kepada yang bersangkutan. Hak asasi korban yang diperdagangkan harus menjadi fokus dari

setiap upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang dan untuk melindungi, membantu, dan memberikan kompensasi.

Kompensasi mencakup pemulihan properti atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita. Kompensasi diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga, dalam bentuk pengembalian harta, membayar ganti rugi atas kerugian atau kesedihan, atau penggantian biaya tindakan tertentu. Ketentuan undang-undang khusus tersebut telah memberikan landasan bagi perlindungan korban termasuk dalam bentuk penuntutan ganti kerugian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan landasan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.

Setiap negara, dalam sistem hukum nasionalnya, harus menjamin langkah-langkah untuk melindungi korban perdagangan orang agar mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban perdagangan orang memang tidak mudah. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak kompensasi dan restitusi bagi korban (hukum dalam teks), namun dalam penerapannya di lapangan (hukum yang berlaku), ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum. Hal ini membuat para korban tindak pidana perdagangan orang sulit mendapatkan hak atas kompensasi dan restitusi.⁴²

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

41 Herlien C.Kamea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Jurnal Lex Crimen* Volume 5, no. Nomor 2 (2016): 130.

42 Cindy Adiastari, "Perlindungan Hukum Perdagangan Anak Dalam Pemberian Kompensasi Dan Hak Restitusi Di Indonesia," *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama* Volume 5, no. Edisi 2 (2018): 369.

hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.⁴³

Kompensasi yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan kondisi korban, dan restitusi yang diberikan tidak mengatur ukuran pemberian sehingga tidak memberikan keadilan bagi korban. Kompensasi atau restitusi yang seharusnya diperoleh korban atau ahli warisnya sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.⁴⁴

Pasal 43 hingga Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Hak yang bisa didapatkan oleh saksi korban perdagangan orang secara umum adalah sebagai berikut: korban berhak untuk mendapatkan kompensasi atas peristiwa yang dialaminya, namun meski demikian korban juga berhak untuk tidak menerima kompensasi tersebut karena sesuatu hal. Apabila korban meninggal dunia maka kompensasi tersebut diberikan kepada ahli warisnya. Korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi serta pembinaan. Korban berhak mendapatkan apa yang sudah menjadi miliknya yang sebelumnya dirampas akibat peristiwa perdagangan orang tersebut. Korban juga dapat menolak untuk bersaksi memberikan keterangan karena takut membahayakan dirinya. Korban berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menggunakan upaya hukumnya.

Selain hak-hak yang disebutkan di atas, korban juga berhak untuk mendapat hak berupa kerahasiaan identitas, restitusi, serta hak atas

rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi.⁴⁵

Salah satu bentuk perlindungan kepada korban kejahatan adalah restitusi. Pada dasarnya suatu negara baik tempat transit maupun negara tujuan penerima korban wajib memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang. Negara wajib memberikan tempat tinggal sementara sebagai tempat berlindung bagi korban.⁴⁶

Menurut asas *restitutio in integrum*, restitusi adalah usaha untuk memulihkan korban kejahatan ke keadaan semula sebelum kejahatan terjadi walaupun disadari bahwa korban tidak mungkin kembali ke keadaan semula. Asas ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan korban harus selengkap mungkin dan melibatkan berbagai aspek akibat kejahatan. Melalui restitusi, korban akan dipulihkan kebebasannya, hak-hak hukumnya, status sosialnya, kehidupan keluarga dan kewarganegaraannya, tempat tinggal, pekerjaan, dan hartanya.

Dua hak restitusi yang harus diberikan terhadap korban perdagangan orang yaitu:

1. Hak atas kerugian pribadi korban

Pemberian ganti rugi ini apabila korban mengalami cacat atau kerugian fisik maupun psikis korban, kehilangan tempat tinggal dan harta kekayaan. Apabila korban mengalami kerugian tersebut maka segala bentuk biaya pengobatan, rehabilitasi, perawatan psikologis, transportasi, dan tempat tinggal, wajib diganti rugi oleh pelaku secara wajar melalui putusan pengadilan.

2. Hak atas kerugian nilai tenaga atau jasa korban.

Pemberian restitusi dilakukan apabila korban dipekerjakan secara paksa namun upah yang didapat tidak sebanding dengan pekerjaan yang

43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.

44 Sulistya dkk Eviningrum, "Mengembangkan Model Perlindungan Hukum Berbasis HAM Terhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia," *Atlantis Press* Volume 358 (2019): hlm. 81.

45 Anggi Rizkita Herda dan Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal For Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)," *Jurnal Res Judicata* Volume 2, no. Nomor 1 (2019): 181–182.

46 Rohaida Nordin, "Protection of the Rights of the Victims of Human Trafficking: Has Malaysia Done Enough?," *Journal of Southeast Asian Human Rights* Volume 3, no. Nomor 2 (2019): 303.

dilakukan. Maka pelaku berdasarkan perintah pengadilan wajib untuk membayar kerugian yang dialami oleh korban. Untuk mengukur berapa jumlah restitusi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban dapat diukur dengan cara yaitu: berdasarkan nilai atau upah jasa korban selama bekerja untuk pelaku atau terdakwa perdagangan orang. Upaya ini sifatnya relatif tergantung dimana korban dipekerjakan dan berapa UMR yang seharusnya diterima oleh pekerja di tempat tersebut. Selain melihat berdasarkan nilai jasa-jasa korban, juga dapat berdasarkan upah minimum lembur apabila tenaga korban diperas untuk dipekerjakan secara terus-menerus, pemberian ganti rugi ini dilihat dari jam kerja yang dilakukan oleh korban. Untuk menentukan berapa upah atau ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku, maka hakim harus memanggil divisi upaya dan Departemen Ketenagakerjaan untuk memberikan keterangan berapa ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban berdasarkan jam kerja di tempat korban bekerja.

Apabila korban perdagangan orang dipekerjakan sebagai pekerja seks, maka pembayaran restitusi bukan dilihat dari jam kerja tapi ganti rugi yang dinilai layak untuk diberikan kepada korban. Ganti rugi ini harus lebih besar dari pada ganti rugi kepada korban yang bukan pekerja seks, karena korban sebagai pekerja seks tidak hanya dirugikan secara tenaga tetapi juga dirugikan secara fisik dan psikis.

Model pemberian restitusi ini mungkin belum diterapkan di pengadilan Indonesia, namun di Amerika Serikat sudah lama diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku, hal ini dapat dilihat dalam kasus Campbell, dimana juri menghukum terdakwa perdagangan orang yang mempekerjakan korban sebagai budak seks dengan hukuman penjara seumur hidup dan biaya ganti rugi sejumlah \$124,529,14 kepada empat korban yang dipaksa bekerja di panti pijat. Hitungan pemberian \$124,529,14 berdasarkan jam kerja yang dipaksa oleh terdakwa. Atas permintaan jaksa, pengadilan menghitung restitusi kepada tiga korban dengan

melihat berapa banyak upah yang seharusnya mereka dapat jika bekerja di panti pijat dan dibayar berdasarkan UMR. Sedangkan untuk korban keempat, juri memberikan \$40.500 karena korban keempat tidak hanya dipaksa menjadi pekerja di panti pijat, namun juga dipaksa untuk menjadi pekerja prostitusi.⁴⁷

Dalam Undang-Undang TPPO dijelaskan mekanisme pemberian restitusi terhadap korban perdagangan orang yaitu korban atau ahli warisnya berhak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi yang diberikan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang telah diterima korban seperti kerugian terhadap harta kekayaan, penderitaan yang dialami korban baik secara fisik maupun psikis, dan kerugian yang lain yang telah dirasakan oleh korban. Pemberian restitusi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan dalam perkara TPPO, implementasi pemberian restitusi sejak 14 hari setelah adanya putusan hukum yang tetap dari pengadilan tingkat pertama.

Namun, Undang-undang tersebut seringkali tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga pemerintah perlu membuat peraturan baru tentang tindak pidana perdagangan orang, terutama mengenai penggantian pidana penjara dengan sanksi restitusi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme dalam penanganan terhadap korban trafficking. Pada satu sisi, penegak hukum lebih condong menggunakan penggabungan perkara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena hal ini dianggap lebih memberikan kepastian hukum, apabila dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangannya KUHAP mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 yang merupakan penjabaran dari UU PSK, meskipun ruang lingkup restitusi ini terbatas pada kerugian materil saja. Sedangkan di sisi lain,

⁴⁷ Alexandra F. Levy and Martina E. Vandenberg, "Breaking in The Law: The Failure to Award Mandatory Criminal Restitution to Victims In Sex Trafficking Cases," *Saint Louis University Law Journal* Volume 60, no.43 (2015): 58.

penegak hukum menginginkan penerapan UUPSK beserta PP Nomor 44 Tahun 2008 karena menilai mekanisme restitusi lebih besar ruang lingkungannya daripada yang diatur oleh KUHAP. Terjadinya dualisme hukum pemberian restitusi dapat dilihat dalam butir-butir Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHAP.

Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) menerangkan, ada kewajiban penuntut umum memberitahukan korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang bersamaan dengan penuntutan, restitusi dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Sedangkan dalam KUHAP Penuntut Umum tidak ada kewajiban memberi tahu atau menginformasikan hak korban untuk mengajukan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud. Oleh karena itu dalam pelaksanaan gabungan perdata ganti kerugian selama ini tidak berhasil. Selain itu dalam KUHAP juga tidak mengatur pelaksanaan tentang penyerahan ganti kerugian kepada korban melalui penitipan konsinyasi.

Selain Pasal 48 ayat (1) di atas, dualisme hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 48 ayat (6) yaitu tenggang waktu pelaksanaan restitusi. Dalam Pasal tersebut dinyatakan, pelaksanaan restitusi dilakukan 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang *inkracht*. Sedangkan dalam Pasal 100 KUHAP tidak ada ketentuan batas waktu penyerahan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Pada dasarnya, restitusi merupakan hak yang diterima oleh korban perdagangan orang, dan penegak hukum wajib untuk memberitahunya, namun kenyataan karena terjadinya dualisme hukum sebagaimana penjelasan di atas, penegak hukum seperti kepolisian sebagai juru pemeriksaan pertama seringkali tidak memasukan restitusi sebagai hak korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga Penuntut Umum juga tidak memasukan restitusi dalam tuntutan, sehingga yang terjadi hakim dalam memutus perkara juga tidak mengabulkan atau memutus

untuk memberikan restitusi kepada korban. Tentunya yang merasa dirugikan dalam hal ini korban perdagangan orang.⁴⁸

KESIMPULAN

Indonesia sudah memiliki UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO, namun tindak pidana perdagangan orang semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan masih belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera. Namun dalam menyelesaikan masalah perdagangan orang di Indonesia, pemerintah juga melakukan berbagai upaya yaitu melakukan hubungan bilateral dengan negara yang menjadi tujuan perdagangan orang, melakukan hubungan kerja sama bilateral pemerintah Indonesia dan melakukan negosiasi untuk kepentingan korban kejahatan perdagangan orang. Selain upaya dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus perdagangan orang di Indonesia organisasi internasional seperti IOM dan ASEAN juga memberikan peran penting, berupa melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menyelidiki pelaku perdagangan orang di Indonesia. Selain itu ASEAN melakukan koordinasi dengan negara anggota melalui jalur politik, ekonomi dan budaya dengan meminta kepada negara-negara yang menjadi tujuan dan transit perdagangan orang agar dapat mengembalikan para korban, serta membentuk deklarasi ASEAN sebagai upaya penyelesaian masalah regional di Asia Tenggara salah satunya penyelesaian masalah perdagangan orang. Korban perdagangan orang tentunya mengalami kerugian sangat besar baik secara materil maupun immateril. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan berupa kompensasi,

48 Lukman Hakim, "Analisis Ketidakefektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)," *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)* Volume 20, no. Nomor 1 (2020): 50.

rehabilitasi, dan reintegrasi, hal ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas oleh pelaku perdagangan orang.

SARAN

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus semakin meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia khususnya perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Lembaga kementerian harus berperan aktif dalam mengatasi masalah ini, khususnya lembaga Imigrasi agar lebih memperketat keamanan di area perbatasan agar penyeludupan orang tidak mudah keluar masuk negara Indonesia, lembaga aparat penegak hukum agar dapat menegakan dan menghukum pelaku sebagaimana mestinya, agar terciptanya keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perdagangan orang, pemerintah melalui Menteri Perekonomian harus siap menyediakan anggaran yang maksimal kepada aparat kepolisian Republik Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja juga harus memberikan pelatihan seluas-luasnya agar memberikan *skill* kepada masyarakat Indonesia sehingga tidak mudah untuk terjerumus menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dan regional agar penanganan tindak pidana perdagangan orang dapat lebih tepat, bagi korban yang berada di luar negeri dapat dipulangkan ke negara asalnya dan mengembalikan hak-hak korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan khususnya kepada rekan *author* yang telah meluangkan waktunya untuk menyelesaikan penulisan artikel ini, dan juga kami ucapkan terimakasih kepada Komnas HAM Republik Indonesia, Kepolisian Jawa Barat yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara. Selanjutnya terimakasih kami ucapkan kepada tim editor dan *reviewer* jurnal HAM yang telah memberikan masukan terhadap tulisan artikel ini. Harapan kami tulisan ini dapat

dipublikasikan sehingga dengan tulisan ini dapat kiranya membuka wawasan kepada pembaca khususnya kepada masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Wandu. "Keamanan Manusia Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Isu Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur." *International Journal Economic Management and Social Science (IJEMSS)* Volume 1, no. Edisi 2 (2018): 47.
- Adiastari, Cindy. "Perlindungan Hukum Perdagangan Anak Dalam Pemberian Kompensasi Dan Hak Restitusi Di Indonesia." *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama* Volume 5, no. Edisi 2 (2018): 369.
- Adinata. "Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues Di Indonesia 2005-2009." *Jurnal Hubungan Internasional* Volume 1, no. Nomor 13 (2012): hlm 46.
- Akmal. *Hak Asasi Manusia Teori Dan Praktek*. Padang: UNP Press Padang, 2015.
- Anggada, Wincent. "Peran Komisi Antar Pemerintah ASEAN Tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) Tentang Perdagangan Manusia Di Indonesia." *Jurnal Internasional Ilmu Sosial, Ekonomi dan Seni* Volume 10, no. Nomor 1 (2020): hlm. 3-4.
- Anggi Rizkita Herda dan Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal For Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)." *Jurnal Res Judicata* Volume 2, no. Nomor 1 (2019): 181–182.
- Ariesta Putri, Diah Ajeng. "Kerja Sama International Organization For Migration (IOM) Dan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Dan Perbudakan Manusia Di Industri Perikanan PT. Pustaka Benjina Reseource Tahun 2015." *Jurnal Internasional of Relations* Volume 5, no. Nomor 1 (2019): 1003.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.

- Boonyarattanasoontom, Jaturong. "Prevention and Solution in Problem of Human Trafficking in Thailand and Cooperation with Neighboring Countries in ASEAN." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* Volume 12, no. Nomor 1 (2018): 237.
- Bradley, Megan. "The International Organization for Migration (IOM): Gaining Power in the Forced Migration Regime." *Journal Canada's on Refugees is Cited* Volume 33, no. Nomor 1 (2017): 99.
- C.Kamea, Herlien. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Jurnal Lex Crimen* Volume 5, no. Nomor 2 (2016): 130.
- Cahya Wulandari; Sonny Saptajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Jurnal Yustisia*, no. Edisi 90 (2014): 16.
- Cahyono Nugroho, Okky. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 18, no. Nomor 4 (2018): 556.
- Chheang, Vannarith. *Migrant Workers in a People-Centered ASEAN Community and ASEAN-Japan Cooperation*, 2015.
- Chongkittavorn, Kavi. *Indonesia Expand ASEAN's Role*, 2011.
- Dwi Hadya Jayani. "KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi Hingga April 2021, Jumlah Kasus Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Eksploitasi Pada Anak (Januari-April 2021)." *Databoks*.
- Emmers, Ralf. *The Threat Of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking and Sea Piracy*. Madrid, Espana, 2003.
- Eviningrum, Sulistya dkk. "Mengembangkan Model Perlindungan Hukum Berbasis HAM Terhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia." *Atlantis Press* Volume 358 (2019): hlm. 81.
- F.Levy, Alexandra. "Breaking in The Law." *Saint Louis University Law Journal* Volume 60, no. Nomor 1 (2015).
- Fadil, Mohammad. "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Volume 1, no. Edisi 5 (2013): hlm. 2.
- Hakim, Lukman. "Analisis Ketidakefektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)." *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)* Volume 20, no. Nomor 1 (2020): 50.
- Van Impe, Kristof. *People for Sale: The Need for a Multidisciplinary Approach Toward Human Trafficking*. Inggris, 2000.
- Iskandar;dkk. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syariah* Volume 23, no. Nomor 1 (2021): 165.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020." *Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia*. Last modified 2020. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>.
- Lisa Curtis; Olivia Enos. "Combating Human Trafficking in ASIA Requires U.S Leadership." *The Heritage Foundation*. Washington, February 2015.
- Marshall, Phil Research Communication Group. "Re-Thinking Trafficking Prevention A Guide to Applying Behavior Theory." *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking and Asian Development Bank (UNIAP)*, 2011.
- Minin, Darwinsyah. "Strategi Penanganan Trafficking Di Indonesia (The Strategy in Dealing with Trafficking in Indonesia)." *Kanun Jurnal Ilmiah Hukum*, no. Nomor 54 (2011).
- Mohadib. "Prospek Dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN." *Jurnal Kajian LEMHANAS RI* Edisi 35 (2018).

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, 2020.
- Naluria Utama, Penny. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Handling Trading of Criminal Acts by The Government of East Nusa Tenggara Province)." *Jurnal HAM* Volume 10, no. Nomor 2 (2019): 200.
- Ni Putu Rai Yuliarti; Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Trafficking Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Internasional Kriminologi dan Sosiologi* Volume 9 (2020): 1397.
- Nordin, Rohaida. "Protection of the Rights of the Victims of Human Trafficking: Has Malaysia Done Enough?" *Journal of Southeast Asian Human Rights* Volume 3, no. Nomor 2 (2019): 303.
- Nur Hidayati, Muslihati. "Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Volume 1, no. Nomor 3 (2012).
- Rahmah Daniah;Fajar Apriani. "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional." *Jurnal Politica* Volume 8, no. Nomor 2 (2017).
- Reed Stout, Samantha. "Human Trafficking in The Wake of Natural Disasters: Is the United States Any Different Than Third World Countries?" University Of Arkansas,Fayetteville, 2018.
- Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2018.
- Sobarnapraja, Agus. "Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Jilid 14, no. Nomor 1 (2020): 17.
- Solim, Jevlin. "Akomodasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (ACTIP) Dalam Peraturan Indonesia." *Jurnal Fiat Justitia* Volume 13, no. Nomor 2 (2019): 169.
- Stout, Samantha. "Human Trafficking in the Wake of Natural Disasters: Is the United States Any Different Than Third World Countries?" Universitas of Arkansas, 2018.
- Suhardin, Yohanes. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 20, no. Nomor 3 (2008): 474.
- Wal Arif, Ghani. "International Organization For Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014." *Jurnal JOM Fisip* Volume 3, no. Nomor 1 (2016): hlm 8-11.
- Wuryandari, Genewati. "Menelaah Politik Luar Negeri Dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia" (n.d.).
- "Masyarakat Sosial Budaya ASEAN." [https://kemlu.go.id/Masyarakat Sosial Budaya ASEAN](https://kemlu.go.id/Masyarakat%20Sosial%20Budaya%20ASEAN).
- "Menutup Celah Perdagangan Anak." <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topic/>.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, n.d.

HALAMAN KOSONG